

**Efektivitas Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa
Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Taloarane
Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe**

**Jenoardi Meleru¹
Fanley Pangemanan²
Stefanus Sampe³**

ABSTRAK

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan yang tumbuh dari perempuan sebagai penggerak, membina dan membentuk keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, oleh karena itu dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera harus dimulai dari upaya mensejahterakan setiap keluarga. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kegiatan program PKK di Desa Taloarane berjalan dengan baik dapat dilihat dari Dalam aspek menentukan pilihan dilaksanakan proses penentuan program melalui mekanisme yang demokratis dengan membuat sebuah musyawarah untuk menggali aspirasi anggota dan kemudian ditetapkan dalam sebuah program, selain itu penentuan program juga hasil dari musyawarah tersebut berarti sesuai dengan keinginan anggota

Kata Kunci : Efektivitas, PKK, Kesejahteraan, Masyarakat

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Peranan perempuan dalam pembangunan telah dengan jelas mengamanatkan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mewujudkan keluarga sejahtera dan membina generasi muda. Sutedjo dalam Gufran (2015:3) menjelaskan bahwa sasaran gerakan PKK adalah Keluarga di pedesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuannya dan kepribadiannya dalam bidang: mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba tuhan, anggota masyarakat dan warga Negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Pembentukan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sekarang ini didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang intinya bahwa untuk mendukung gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga perlu diberikan landasan hukum untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan kemampuan dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pada pasal 1 disebutkan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk

masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Adapun berdasarkan peraturan presiden mengenai PKK tersebut pada pasal 11 disebutkan Gerakan PKK dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi: penghayatan dan pengamalan Pancasila; gotong royong; pangan; sandang; perumahan dan tata laksana rumah tangga; pendidikan dan keterampilan; kesehatan; pengembangan kehidupan berkoperasi; kelestarian lingkungan hidup; dan perencanaan sehat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga pasal 2 disebutkan Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendali dan penggerak. Pembinaan PKK kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam

kerjasama dengan unsur Dinas atau Instansi Pemerintah terkait. Tim penggerak PKK memiliki IV (empat) Kelompok Kerja atau Pokja yaitu Pokja I tugas-tugas berkaitan dengan penghayatan Pancasila dan gotong royong; Pokja II, tugas-tugasnya berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan; Pokja III, tugas-tugasnya berkaitan dengan program sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga; Pokja IV, tugas-tugasnya berkaitan dengan program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Program pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK. Gerakan PKK bertujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kegiatan PKK biasanya diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa melalui program-program yang dijalankan. Sehingga membawa kaum perempuan sebagai agen yang sangat penting bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Adapun 10 program yang dimiliki oleh PKK, yaitu penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana

rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Keterkaitan perempuan dengan PKK ialah mengenai bagaimana perempuan itu dapat aktif untuk mencapai kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan di PKK sehingga eksistensi perempuan diakui oleh semua pihak. Hasil pemberdayaan tersebut nantinya dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas hidup keluarga dan adanya peningkatan ekonomi dari keluarga itu sendiri. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan didalam PKK maka diperlukan akselerasi PKK melalui Reformasi PKK sehingga dapat mengoptimalkan kesejahteraan keluarga.

Desa Taloarane merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana jumlah penduduk di desa tersebut berjumlah 900 orang. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 410 orang. Desa Taloarane juga memiliki Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa yang diketuai oleh istri dari kepala desa.

Dari pengamatan peneliti dilapangan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Taloarane telah memiliki program kegiatan yang berkaitan dengan pangan yakni kegiatan gotong royong menanam tanaman cabai, tanaman umbi-ubian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menjual kue dan menjahit baju untuk kemudian dipergunakan dalam rumah tangga dan sebagian dijual untuk mendapatkan keuntungan bagi anggota selain itu juga ada kegiatan simpan pinjam yang

dilaksanakan oleh anggota untuk masyarakat. Tantangan bagi kader gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di era modernisasi ini semakin berat. Bukan hanya menyesuaikan rancangan kegiatan masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah, kader PKK juga harus mampu menangani pergantian kader yang berhenti. Hingga mengikutsertakan ibu muda dalam kegiatan-kegiatan PKK. Karena sejauh ini anggota PKK di Desa Taloarane beranggotakan kebanyakan ibu-ibu yang sudah diatas 50 tahun.

Kegiatan menanam *rica* (cabai) dan umbi-umbian di Desa Taloarane sudah berjalan sekitar 3 tahun, namun kegiatan tersebut peneliti menilai belum mampu untuk mendongkrak pendapatan keluarga, oleh sebab itu seharusnya tim penggerak PKK Desa berinovasi dengan mengadakan program lain serta memberdayakan ibu-ibu yang lain terutama yang masih muda..

Tinjauan Pustaka **Konsep Efektivitas**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang efektivitas, berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep dari efektivitas. Dalam hal efektivitas F. Drucker dalam Sugiyono (2010:23) menyatakan efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya Fremont E. Kas dalam Sugiyono (2010:23) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Sedangkan menurut William N. Dunn (2005:498) efektivitas (effectiveness) adalah suatu kriteria

untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi.

Menurut Harbani Pasolong (2012:51) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. James L. Gibson dkk (2006:38) dalam Harbani Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo dalam Harbani Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan Keban dalam Harbani Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat

- keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
 3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan
 4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
 5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
 6. dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
 7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
 8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Hari Lubis dan Martani Huseini (2007:55), menyatakan efektifitas sebagai konsep yang sangat penting

dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.

Tinjauan Mengenai Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 pasal 1 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan Keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pasal 1 disebutkan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keuarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan

Metode Penelitian

pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai sumber metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas program dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe dengan menggunakan teori dari teori dari Makmur (2010) mengenai efektivitas sebagai teori utama untuk membedah permasalahan yang ada.

1. Ketepatan Waktu
2. Ketepatan dalam menentukan pilihan
3. Ketepatan Sasaran
4. Ketepatan melakukan perintah

3. Informan

Dari informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan dengan peran PKK di masyarakat khususnya melalui program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informan dalam penelitian ini terdiri adalah :

- Kepala Desa
- Ketua Tim Penggerak PKK Desa Taloarane
- Anggota PKK
- Masyarakat

Pembahasan

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas program dari Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe dengan menggunakan teori dari teori dari Makmur (2010) mengenai efektivitas sebagai teori utama untuk membedah permasalahan yang ada.

1. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai wadah kegiatan wanita mempunyai peranan dalam membantu program pemerintah melalui gerakannya yang bertujuan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, maju dan mandiri. PKK mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberdayakan keluarga terutama perempuan sebagai motor penggeraknya.

Ketepatan dalam menentukan pilihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan. Karena apabila salah dalam menentukan pilihan, maka tujuan utama yang ingin dicapai tidak akan tercapai meskipun program yang dijalankan berhasil. Seperti apabila penggunaan anggaran dana kelurahan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan terasa tidak efektif meskipun program tersebut berhasil dijalankan.

Dalam menentukan program kerja suatu organisasi termasuk PKK, merupakan aspek penting dan mendasar dan menjadi acuan untuk kegiatan yang akan dilakukan, dimana proses perencanaan betul-betul matang dan terukur. Terutama bagi kegiatan yang melibatkan banyak orang

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai efektivitas program PKK Desa Taloarane dalam aspek penentuan pilihan terutama program kerja, peneliti melihat bahwa dalam menentukan program dilakukukan terlebih dahulu musyawarah antar pimpinan yang menghasilkan calon-calon program dan kemudian di buat rapat terbuka bagi anggota dan kemudian ditetapkan program yang kemudian dikerjakan.

Terdapat beberapa program yang telah ditetapkan dan dijalankan selama ini di Desa Taloarane oleh Tim Penggerak PKK dan anggota menurut para informan seperti ibadah rutin, arisan, kegiatan gotong royong, kerjabakti, kegiatan simpan pinjam, pembuatan kue dan dipasarkan dan juga kegiatan menanam cabai dan kemudian dipasarkan. Namun beberapa informan lebih memilih agar penentuan program dapat menyentuh sisi kemampuan anggota seperti pelatihan.

2. Ketepatan Sasaran

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan yang tumbuh dari bawah untuk membangun keluarga sejahtera sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan.

Tujuan dari Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadran hukum dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan Gerakan PKK tersebut, dalam pelaksanaannya di lapangan perlu adanya dukungan dan peningkatan koordinasi dengan Pembina Tim Penggerak PKK di semua jenjang dan dengan lembaga lain.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti melihat bahwa sasaran utama dari kegiatan tim penggerak pkk ada ibu-ibu desa dimana untuk memberdayakan peran istri dalam keluarga untuk menunjang kesejahteraan keluarga. Berdasarkan wawancara dengan para informan masyarakat anggota pkk bahwa kegiatan pkk memang ditujukan untuk membantu kaum perempuan khususnya istri agar dapat membantu suami dalam keluarga, namun beberapa masalah yang justru terjadi dimana beberapa kali terjadi selisih paham antar anggota dan juga pimpinan, selain itu dari informan masyarakat yang bukan anggota pkk menuturkan bahwa program kegiatan pkk desa Taloarane belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan ibu-ibu dan juga belum dapat memberdayakan perempuan di desa menurut informan bahwa seharusnya ada program yang dapat meningkatkan kemampuan para anggota seperti latihan menjahit, kursus memasak, atau latihan penggunaan media social dalam memasarkan produk.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti melihat aspek ketepatan

sasaran belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggota dan belum mampu memberdayakan anggota untuk dapat menjadi lebih baik, program yang ada masih kebanyakan program rutin yang juga dilaksanakan dalam berbagai organisasi seperti jaga, rukun keluarga.

3. Ketepatan melakukan perintah

Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui gerakan ini pula peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Dihadapkan pada kenyataan seperti itu, maka gerakan PKK dituntut untuk menumbuhkan kembangkan sikap dan perilaku, kemandirian pribadi, keluarga dan masyarakat agar tidak salah dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dewasa ini. Tantangan yang dihadapi antara lain perkembangan sumber daya manusia, pergeseran tata nilai, pemanfaatan sumber daya alam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tatanan Internasional dan penanganan manajemen pemerintahan dan pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait. Untuk itu perlu adanya ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

Berdasarkan Tim Penggerak PKK Pusat. Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK. Rincian Tugas dan Fungsi TP PKK di tingkat Desa / Kelurahan adalah:

1) Menyusun rencana kerja TP PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota.

- 2) Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Desa/Kelurahan melalui Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/kota selaku Pembina TP PKK, agar rencana kerja TP PKK Desa/Kelurahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari “Dokumen Perencanaan Pembangunan” pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
- 4) Memberikan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
- 5) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- 6) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- 7) Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
- 8) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan.
- 9) Membuat laporan hasil kegiatan pada Ketua TP PKK Desa/Kelurahan dan TP PKK Kecamatan.

- 10) Melaksanakan tertib administrasi.
- 11) Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Desa/Kelurahan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Taloarane mengenai aspek kepatuhan dalam melakukan perintah belum sepenuhnya efektif hal tersebut dapat dilihat dari keanggotaan PKK itu sendiri di desa dimana masih banyak ibu-ibu yang belum ikut aktif dalam kegiatan PKK, menurut para informan bahwa kegiatan PKK tidak menarik dan banyak bermusuhan karena bercerita yang tidak baik.

Apabila dikaji dari tugas pkk berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK. Rincian Tugas dan Fungsi TP PKK di tingkat Desa / Kelurahan, di desa Taloarane tim penggerak PKK belum sepenuhnya menjalankan tugas seperti: Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan Melaksnakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera. Walaupun sebenarnya penting untuk menjalankan program tersebut karena pada hakekatnya PKK harus lebih menyentuh pada kekeluargaan dan dapat juga mensejahterakan keluarga bukan hanya dari sisi keuangan keluarga saja namun juga dapat mensejahterakan keluarga lewat penyuluhan dan konseling keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa aspek ketepatan melakukan perintah pada program pemberdayaan kesejahteraan keluarga di desa Taloarane belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari

masih banyaknya ibu-ibu pkk yang tidak aktif dalam kegiatan pkk.

Penutup

Kesimpulan

1. Dalam aspek menentukan pilihan dilaksanakan proses penentuan program melalui mekanisme yang demokratis dengan membuat sebuah musyawarah untuk menggali aspirasi anggota dan kemudian ditetapkan dalam sebuah program, selain itu penentuan program juga hasil dari musyawarah tersebut berarti sesuai dengan keinginan anggota.
2. Pada aspek ketepatan sasaran dari hasil penelitian terlihat belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggota dan belum mampu memberdayakan anggota untuk dapat menjadi lebih baik, program yang ada masih kebanyakan program rutin selain itu program sebenarnya menyasar semua ibu-ibu yang ada di desa dan kemudian dirangkul
3. Dalam menjalankan sebuah organisasi, sebuah kepatuhan menjalankan perintah sangat penting untuk dilakukan oleh semua anggota. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa aspek ini belum sepenuhnya optimal dengan masih banyaknya para ibu-ibu yang ikut namun tidak aktif dalam kegiatan dengan berbagai alasan dan keluhan

Saran

- a. dalam rangka membuat program tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga desa Taloarane lebih baik, maka disarankan agar mengundang lebih banyak ibu-ibu desa baik anggota maupun belum masuk dalam keanggotaan agar lebih banyak referensi selain itu dalam

- menentukan program sebaiknya melihat aspek kebutuhan lainnya seperti peningkatan kemampuan melalui kursus dan pelatihan
- b. Agar supaya program kerja tim penggerak PKK lebih tepat sasaran, maka disarankan untuk dilakukan survey kepuasan kinerja dan program kepada semua ibu-ibu dan masyarakat serta membuka saran yang positif bagi program yang dijalankan dan diadakan evaluasi secara berkala mengenai kegiatan yang sementara dilakukan.
- c. Pimpinan Tim penggerak PKK desa Taloarane penting untuk merangkul lebih banyak anggota di desa, selain itu kesejahteraan anggota juga perlu diperhatikan bukan hanya dari sisi ekonomi namun juga dari sisi non ekonomi seperti adanya kegiatan konseling dan kegiatan rumah ke rumah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan dapat lebih mudah diterima di masyarakat.
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ronaldo Joel Munaiseche, Fanley N Pangemanan, Neni Kumeyas. 2021. *"Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa"*.
- Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* Bandung: Afabeta
- Midgley, James 2005, *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan* diterjemahkan oleh Fathruhsyah, Jakarta: Bina Rena Pariwara
- Moleong*. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Nasikun, 2013, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Rivaldo Steni Imanuel Lumangkun, Marlin T Lapian, Stefanus Sampe. 2021. *"Peran Pemerintah Profinsi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Peternak Ikan Air Tawar Di Kecamatan Dimembe (Suatu Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara)"*
- Steers, R, 2008. *Efektivitas Organisasi*, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Pranarka A M. W. dan Vidhandika Moeljarto, "Pemberdayaan (Empowerment)", dalam Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds). 2011. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS

Daftar Pustaka

- Adi, Riando. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Anwas, Oos M. 2013. "Pemberdayaan Masyarakat di Era Global". Bandung; Alfabeta
- Bintarto. 2009. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Corbin. 2003. "Dasar-dasar Penelitian. Kualitatif". Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Korten, David C dan Sjahrir. 1998. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Siagian. 2010. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Penerbit Gunung Agung
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
- Suud, Mohammad , 2006. 3 orientasi kesejahteraan sosial, Prestasi Pustaka
- Robbins S. P, 2008. *Perilaku Organisasi, Jilid 1 & 2*, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Suriadi, Agus. 2005. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Diktat)
- Todaro, Michael. P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Pont, A. 1991. *Perilaku Keorganisasian*. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Spencer Dan Spencer dalam Palan. 2007 *Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi*. PPM. Jakarta
- Kepegawaian Daerah Kepulauan Sangihe Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Kota Manado*. Manado : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fisip Unsrat. Kota Manado. 1
- Dwi. C., I. Sumampow dan F. C. Singkoh. *Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Tinompo Kecamatan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara*. Kota Manado : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fisip Unsrat
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Keputusan BKN Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2003 tentang peningkatan kompetensi aparatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan "kompetensi pemerintahan

Sumber Lainnya

- Hanibe. A. M., S. Sambiring dan J. Kairupan 2018. *Profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Bidang*